

## Analisis pengaruh pad, dau, dak terhadap belanja modal

Farhan Kresna Pramudya<sup>1\*</sup>, M. Faisal Abdullah<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Malang.

\*Email: farhankresna99@gmail.com

### Abstrak

Peran belanja modal sangat penting dalam pembangunan daerah, belanja modal digunakan pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Untuk meningkatkan alokasi belanja modal, pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber dana yang berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten Di Pulau Madura Tahun 2014-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Kabupaten Di Pulau Madura pada situs Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (DJPK) tahun 2014-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Di Pulau Madura.

**Kata Kunci:** Pendapatan asli daerah (pad); dana alokasi umum (dau); dana alokasi khusus (dak); belanja modal

## *Analysis of the effect of pad, dau, dak on district capital expenditures*

### *Abstract*

*The role of capital expenditure is very important in regional development, capital expenditure is used by local governments to obtain fixed assets and other assets that have benefits for more than one year. To increase the allocation of capital expenditures, local governments can use sources of funds that affect capital expenditures. This study aims to determine the effect of the variable Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) has an influence to the Capital Expenditure districts on Madura Island 2014-2018. The type of data used in this study is secondary data taken from the Realization Report districts on Madura Island on the website of the Directorate General of Balance and Finance (DJPK) 2014-2018. The analysis method used in this research is panel regression analysis. The results of this study are Regional Original Income has a negative and significant effect on capital expenditure. General Allocation Fund has a negative and insignificant effect on capital expenditure and Special Allocation Fund has a positive and significant effect on capital expenditure.*

**Keywords:** *Regional original income (pad); general allocation fund (dau); special allocation fund (dak); capital expenditures*

---

---

## PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 1999 menyebabkan pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yakni penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai hal yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah sendiri merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya secara mandiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2002), agar setiap daerah memiliki daya unggul yang dikelola secara mandiri dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan permulaan berjalannya otonomi daerah di Indonesia (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan antar daerah, karena setiap daerah memiliki daya unggul dan potensi masing-masing. Kemandirian suatu daerah seluruhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar pendapatan asli daerah bertambah. Potensi daerah dapat dikembangkan melalui alokasi belanja daerah.

Belanja daerah dibagi menjadi 2 bentuk yakni Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja operasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan dengan manfaat kurang dari satu tahun (Mahmudi, 2010). Sedangkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP Nomor 71 Tahun, 2010). Dalam pemanfaatannya Alokasi Belanja Modal digunakan untuk suatu hal yang bersifat produktif, Semisal melakukan aktivitas pembangunan, penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Untuk meningkatkan anggaran Belanja Modal pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber dana yang terdapat di dalam APBD diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Ardhani, 2013).

Pada Kabupaten di Pulau Madura Anggaran pengeluaran pemerintah belum di fokuskan pada anggaran Belanja Modal dan Investasi Fisik melainkan penyaluran dana banyak tersalurkan pada Belanja Pegawai. Adanya pembangunan jembatan suramadu yang diresmikan pada tahun 2009 belum menjamin pembangunan di Pulau Madura merata, di sebagian wilayah belum mengalami pembangunan yang signifikan (Supriyadi, 2020). Tahun 2015 adanya wacana madura memisahkan diri dari provinsi jawa timur dan menjadi provinsi sendiri, Namun wacana tersebut memiliki tantangan berat dalam realisasinya. Secara administratif pulau madura terdiri dari 4 kabupaten, padahal untuk menjadi sebuah provinsi harus memiliki minimal 5 Kabupaten/Kota (Stefanie, 2015). Pada sektor ekonomi Kabupaten yang ada di Pulau Madura masih jauh jika dibanding dengan daerah lain, dilihat dari penerimaan PAD masing-masing Kabupaten masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi jawa timur (Taqiyah, 2015). Meskipun PAD setiap tahun meningkat, namun tingkat ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat yakni dana perimbangan masih terus meningkat (Sutantyo, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur atau cerminan daerah dalam mengukur seberapa besar tingkat kemandiriannya. Setiap daerah memiliki peraturannya tersendiri mengenai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat. Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten di Pulau Madura masih tergolong rendah meskipun setiap tahunnya meningkat. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa sektor yang belum berkontribusi secara maksimal dalam Pendapatan Asli Daerah, sehingga masih perlu peningkatan dalam menggali potensi yang ada di masing-masing kabupaten yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah.

Menurut (UU Nomor 33 Tahun, 2004) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Namun beberapa Kabupaten di Pulau Madura serapan anggaran DAU masih terbilang minim, Sehingga menyebabkan pengurangan dana karena realisasi di tahun sebelumnya kurang maksimal. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005) jumlah DAU sekurang-kurangnya ditetapkan sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

Menurut (UU Nomor 33 Tahun, 2004) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan pengalokasiannya bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus juga merupakan pendapatan daerah yang ikut berperan dalam pembangunan daerah terutama pembangunan kegiatan khusus. Ketika Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan maka belanja modal akan menurun begitu juga sebaliknya, jika hal tersebut terjadi akan berdampak pada perkembangan pembangunan daerah karena Dana Alokasi Khusus memiliki peran dalam pembangunan daerah terutama kegiatan khusus dan kegiatan pembangunan fisik..

Adapun hasil peneliti terdahulu yang dilakukan (Rinaldi, 2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatra Selatan. Penelitian oleh (Gerungan et al., 2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015. Penelitian oleh (Hairiyah et al., 2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Moda pada Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Tahun 2010-2015. Penelitian oleh (Sundari, 2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kota Cimahi Tahun 2001-2016. Penelitian oleh (Annisa, 2020) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Se-Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan lokasi penelitian berada di wilayah Pulau Madura. Populasi dalam penelitian ini adalah 4 Kabupaten yang ada di Pulau Madura (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) dengan menggunakan teknis sensus dalam pengambilan sampelnya, dimana semua populasi Kabupaten yang ada di Pulau Madura dijadikan sebagai sampel.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD yakni Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kabupaten di Pulau Madura Tahun 2014-2018 yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Model persamaan regresi panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + x_{it}^1\beta_1 + x_{it}^2\beta_2 + x_{it}^3\beta_3 + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$Y_{it}$  : Belanja Modal

$\alpha_i$  : Konstanta

$\beta_1$ -  $\beta_3$  : Koefisien variabel independen 1-3

$x_1$  : Pendapatan Asli Daerah

- $x_2$  : Dana Alokasi Umum  
 $x_3$  : Dana Alokasi Khusus  
 $\varepsilon_{it}$  : Nilai Gangguan atau Error (Effendi & Setiawan, 2014)

Dalam estimasi model data panel terdapat 3 teknik model yang sering digunakan yakni : *Common Effect* (CE), *Fixed Effect* (FE) dan *Random Effect* (RE). Untuk menentukan pemilihan model terbaik dilakukan pengujian estimasi model menggunakan 3 cara yaitu : Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM Breusch-Pagan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan uji hipotesis sebelumnya dilakukan terlebih dahulu pemilihan model terbaik untuk menentukan model yang tepat digunakan dalam penelitian. Dalam estimasi model data panel terdapat 3 teknik model yang sering digunakan yakni : *Common Effect* (CE), *Fixed Effect* (FE) dan *Random Effect* (RE). Untuk menentukan pemilihan model terbaik dilakukan pengujian estimasi model menggunakan 3 cara yaitu : Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM Breusch-Pagan.

### Pemilihan model terbaik

Tabel 1. Hasil Uji Chow  
Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.188417	(3,13)	0.9024
Cross-section Chi-square	0.851242	3	0.8372

Dari Hasil olahan uji chow dengan menggunakan model FE menghasilkan nilai Prob Cross Section F sebesar 0.9024 hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga diputuskan untuk atau model CE lebih tepat.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman  
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.565251	3	0.9043

Dari Hasil olahan uji hausman dengan menggunakan model RE menghasilkan nilai Prob Cross-Section Random sebesar 0.9043 hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga diputuskan untuk model RE lebih tepat.

Tabel 3. Hasil Uji LM Breusch-Pagan  
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.643202 (0.1999)	6.848484 (0.0089)	8.491686 (0.0036)
Honda	-1.281875 --	2.616961 (0.0044)	0.944049 (0.1726)
King-Wu	-1.281875 --	2.616961 (0.0044)	0.744197 (0.2284)
Standardized Honda	-0.769024 --	3.644836 (0.0001)	-0.794133
Standardized King-Wu	-0.769024 --	3.644836 (0.0001)	-1.034879 --

Gourieriou, et al.*	--	--	6.848484 ( $< 0.05$ )
---------------------	----	----	--------------------------

Dari Hasil olahan uji LM Breusch-Pagan dengan menggunakan model CE menghasilkan nilai breusch-pagan sebesar 0.1999 hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga diputuskan untuk model CE lebih tepat.

Dari ketiga uji yang dilakukan yakni uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM Breusch-Pagan dapat diketahui bahwa model *Common Effect* adalah model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun model *Common Effect* sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Panel Metode CE

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.44E+11	1.62E+11	4.596847	0.0003
PAD	-1.199964	0.564274	-2.126563	0.0494
DAU	-0.319404	0.188042	-1.698578	0.1088
DAK	0.618946	0.255016	2.427088	0.0274
R-squared	0.396572	Mean dependent var		3.78E+11
Adjusted R-squared	0.283429	S.D. dependent var		1.05E+11
S.E. of regression	8.92E+10	Akaike info criterion		53.44220
Sum squared resid	1.27E+23	Schwarz criterion		53.64134
Log likelihood	-530.4220	Hannan-Quinn criter.		53.48107
F-statistic	3.505059	Durbin-Watson stat		1.888396
Prob(F-statistic)	0.039883			

Persamaan Regresi Data Panel adalah sebagai berikut:

$$BM = 744257806121 - 1.19996388453*PAD - 0.319404116587*DAU + 0.618946137136*DAK$$

Tabel 5. Hasil uji multikolinearitas

	PAD	DAU	DAK
PAD	1.000000	0.373162	0.583862
DAU	0.373162	1.000000	0.313851
DAK	0.583862	0.313851	1.000000

Dari hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Suatu model regresi dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas jika nilai korelasi  $< 0.8$ . Hasil dari tabel di atas menunjukkan hasil korelasi antar variabel tidak ditemukan nilai lebih dari 0.8. Sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.63E+11	8.12E+10	3.236524	0.0052
PAD	-0.439107	0.283137	-1.550863	0.1405
DAU	-0.170162	0.094354	-1.803435	0.0902
DAK	0.154085	0.127960	1.204163	0.2460

Dari hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas jika nilai probabilitas  $> 0,05$ . Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (PAD, DAU dan DAK) memiliki nilai probabilitas  $> 0,05$ . Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Uji simultan (uji-f)

Tabel 7. Hasil regresi panel uji-f

R-squared	0.396572	Mean dependent var	3.78E+11
Adjusted R-squared	0.283429	S.D. dependent var	1.05E+11
S.E. of regression	8.92E+10	Akaike info criterion	53.44220
Sum squared resid	1.27E+23	Schwarz criterion	53.64134

Log likelihood	-530.4220	Hannan-Quinn criter.	53.48107
F-statistic	3.505059	Durbin-Watson stat	1.888396
Prob(F-statistic)	0.039883		

Dari hasil uji-f diatas dapat diketahui besarnya nilai Fstatistic sebesar 3.505059 sementara nilai F-tabel dengan  $\alpha=5\%$  df1 (k-1)=(4-1)= 3 dan df2 (n-k)=(20-4)= 16 maka besarnya nilai F-tabel adalah 3.24. sehingga F-statistic (3.505059) > F-tabel (3.24) dan nilai Prob FStatistic sebesar 0.0399 nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat diartikan bahwa minimal satu diantara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal.

### Uji parsial (uji-t)

Dari ketiga uji yang dilakukan yakni uji *chow*, uji hausman dan uji LM *breusch-pagan* dapat diketahui bahwa model *Common Effect* (CE) lebih tepat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil regresi panel uji-t

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Date: 03/03/21 Time: 20:58

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.44E+11	1.62E+11	4.596847	0.0003
PAD	-1.199964	0.564274	-2.126563	0.0494
DAU	-0.319404	0.188042	-1.698578	0.1088
DAK	0.618946	0.255016	2.427088	0.0274

Untuk melihat tingkat signifikan dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel PAD diperoleh sebesar  $0.0494 < 0.05$  artinya terdapat pengaruh variabel PAD (X1) terhadap Belanja Modal (Y), Maka dapat diputuskan bahwa variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan kata lain ketika PAD meningkat maka Belanja Modal akan menurun.

Untuk variabel DAU, diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0.1088 > 0.05$ . artinya tidak terdapat pengaruh variabel DAU (X2) terhadap Belanja Modal (Y), Maka dapat diputuskan bahwa variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan kata lain ketika DAU meningkat maka alokasi Belanja Modal menurun.

Sedangkan untuk variabel DAK, diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0.0274 < 0.05$  artinya terdapat pengaruh variabel DAK (X3) terhadap Belanja Modal (Y), Maka dapat diputuskan bahwa variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Artinya ketika DAK mengalami peningkatan maka akan diikuti pula peningkatan terhadap Belanja Modal.

### Pengaruh pad (pendapatan asli daerah) terhadap belanja modal

Berdasarkan hasil dari pengolahan uji regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi PAD diperoleh nilai koefisien sebesar -1.99964, Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% maka akan menurunkan alokasi Belanja Modal sebesar -1.99964. Hal ini terjadi karena kontribusi PAD terhadap Belanja Modal masih rendah karena penerimaan PAD masih sangat kecil. Anggaran PAD dialokasikan untuk biaya pemeliharaan rutin sehingga pada saat pemerintah daerah menambah pengadaan aset tetap dan aset lainnya guna melakukan pembangunan daerah melalui alokasi belanja modal, maka akan berdampak pada berkurangnya PAD karena beban biaya pemeliharaan rutin semakin bertambah. Selain itu, Pemerintah daerah belum maksimal dalam mengelola dan menggali potensi di daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Annisa, 2020) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Selain itu hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Rinaldi, 2016) juga menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal namun tidak signifikan

---

---

**Pengaruh dau (dana alokasi umum) terhadap belanja modal**

Begitu juga dengan nilai koefisien regresi DAU diperoleh nilai koefisien sebesar -0.319404, Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAU sebesar 1% maka akan menurunkan alokasi Belanja Modal sebesar -0.319404. Hal ini disebabkan karena ada indikasi pemerintah daerah menggunakan DAU digunakan untuk belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya dari pada di alokasikan untuk Belanja Modal. DAU merupakan pos yang memperoleh dana transfer paling banyak dari pemerintah pusat, Namun dalam penggunaannya digunakan untuk menanggung belanja pegawai ataupun biaya lainnya. Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Gerungan et al., 2017) yang menunjukka bahwa DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Selain itu penelitian yang dilakukan (Hairiyah et al., 2017) juga menyatakan bahwa setelah pemekaran DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal

**Pengaruh dak (dana alokasi khusus) terhadap belanja modal**

Berbeda dengan kedua variabel lainnya nilai koefisien regresi DAK diperoleh nilai koefisien sebesar 0.618946, Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAK sebesar 1% maka akan meningkatkan alokasi Belanja Modal sebesar 0.618946. Pemanfaatan DAK sudah diarahkan pada kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang direalisasikan melalui belanja modal, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan pemerintah daerah dapat menambah aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang dan pengalokasian dana transfer yang lain agar lebih dialokasikan untuk belanja modal sehingga dapat melakukan pemerataan pembangunan. Pemanfaatan DAK yang optimal dan tepat sasaran merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pembangunan di daerah dapat merata. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sundari, 2018) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Selain itu hasil penelitian (Gerungan et al., 2017) juga memperkuat hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Secara simultan, ketiga variabel independen yakni PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten di Pulau Madura; (2) Variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten di Pulau Madura; (3) Variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten di Pulau Madura; (4) Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten di Pulau Madura

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasannya, sehingga saran untuk kedepannya adalah untuk pemerintah daerah Kabupaten di Pulau Madura dapat menggali lebih dalam potensi pada masing-masing wilayah yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah dan melihat Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten di Pulau Madura selayaknya dapat mengurangi pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dan lebih dialokasikan pada Belanja Modal yang secara tidak langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten di Pulau Madura sebaiknya lebih meningkatkan Dana Alokasi Khusus yang diproporsikan pada Belanja Modal, Karena Dana Alokasi Khusus digunakan dalam pengembangan sarana dan prasarana publik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Peneliti Selanjutnya apabila mengambil topik yang sejenis disarankan untuk memperluas variabel yang belum digunakan dalam penelitian ini (selain PAD, DAU dan DAK) yang diduga dapat mempengaruhi Belanja Modal.

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten dan Kota Se-Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Dan Papua Barat Tahun 2014-2018.
- Ardhani, P. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 108–117.
- Effendi, N., & Setiawan, M. (2014). *Ekonometrika : Pendekatan Teori dan terapan*. Salemba Empat.
- Gerungan, H., Saerang, D. P. ., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Uumu, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15427>
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *Kinerja*, 14(2), 85. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483>
- Indonesia, P. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 55.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, (2005).
- Indonesia, P. (2010). Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.
- Rinaldi, A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.
- Stefanie, C. (2015). Ingin Jadi Provinsi, Madura Diingatkan Soal Kemandirian. CNN Nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151112164710-20-91295/ingin-jadi-provinsi-madura-diingatkan-soal-kemandirian>
- Sundari, R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Cimahi. Vol 10. No.
- Supriyadi. (2020). Bangkalan Masih Suram Meski Ada Suramadu, Kaukus Parlemen Madura Minta Optimalisasi BPWS. *JatimTimes*. <https://jatimtimes.com/baca/218819/20200716/185900/bangkalan-masih-suram-meski-ada-suramadu-kaukus-parlemen-madura-minta-optimalisasi-bpws>
- Sutantyo, E. H. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Empat Kabupaten Di Pulau Madura Tahun 2011-2015. 45, 39.
- Taqiqiyah, B. (2015). Melihat Kesiapan Madura Menjadi Provinsi. *Regional.Kontan.Id*. <https://regional.kontan.co.id/news/melihat-kesiapan-madura-menjadi-provinsi>
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (Edisi 1)*. Raja Grafindo persada.